

**TATA KELOLA PEMERINTAHAN DESA DALAM MEWUJUDKAN DESA MANDIRI  
DI DESA KABUNA KECAMATAN KAKULUK MESAK  
KABUPATEN BELU PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

ALDI

NPP 31.0764

*Asdaf Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur*

*Program Studi Politik Indonesia Fakultas Politik Pemerintahan*

email : aldir321@gmail.com

Pembimbing Skripsi : Dr. Tri Raharjanto, S.STP., M.Si., M.H

**ABSTRACT**

**Problem Statement/Background (GAP):** Governance at the village level in East Nusa Tenggara Province requires further attention given the very few independent villages in the region. In 2018, Kabuna Village was the only Independent Village in East Nusa Tenggara, but it was downgraded back to a Developed Village status after misuse of power by the village government in office at that time. From 2019 to 2021, East Nusa Tenggara did not have a single independent village. Kabuna Village has a lot of potentials that, if utilized, could restore the village back to Independent Village status. **Objective:** This study aims to understand how village governance by the Kabuna Village Government can achieve an Independent Village status. **Method:** This research uses qualitative research with descriptive methods and a descriptive approach. The study employs the Good Governance Theory from Sedarmayanti, which includes five dimensions: Participation, Transparency, Accountability, Effectiveness, and Law Enforcement. **Results/Findings:** Based on the research conducted in January 2024, the Kabuna Village Government has made optimal efforts in administering governance in Kabuna Village. Factors hindering the realization of an independent village include limited natural resources, village funds, inadequate human resources, and the community's indifference towards the goal of returning Kabuna Village to an independent status. Supporting factors include human resource development programs, utilization of natural resources, support from village institutions, and active community participation. **Conclusion:** Researchers suggest the village government should further disseminate information about independent villages, establish partnerships with stakeholders such as private parties or external companies, and cooperate with Village Institutions to maximize the use of natural resources for the benefit of the village.

**Keywords:** Governance, Village Government, Independent Village

**ABSTRAK**

**Latar Belakang (GAP):** Tata Kelola Pemerintahan tingkat desa di Provinsi Nusa Tenggara Timur harus diperhatikan lebih lanjut dilihat dari jumlah desa mandiri di Nusa Tenggara Timur yang sangat sedikit. Desa Kabuna pada tahun 2018 merupakan satu-satunya Desa Mandiri yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Timur namun turun kembali ke status Desa Maju setelah penyalahgunaan kekuasaan dilakukan oleh pemerintah desa yang menjabat saat itu. Dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 Nusa Tenggara Timur tidak memiliki satupun desa mandiri. Desa Kabuna memiliki banyak potensi

yang jika dimanfaatkan dapat mengembalikan status desa kembali ke Desa Mandiri. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Tata Kelola Pemerintahan Desa oleh Pemerintah Desa Kabuna dalam mewujudkan Desa Mandiri. **Metode:** Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan metode deskriptif dan pendekatan deskriptif. Penelitian ini menggunakan Teori Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dari Sedarmayanti yang memiliki lima dimensi yaitu Partisipasi, Transparansi, Akuntabilitas, Efektivitas, dan Penegakkan Hukum. **Hasil/Temuan:** Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada Januari 2024, Pemerintah Desa Kabuna telah berupaya secara optimal dalam penyelenggaraan pemerintahan di Desa Kabuna. Adapun faktor penghambat dalam mewujudkan desa mandiri antara lain yaitu keterbatasan sumber daya alam, dana desa, sumber daya manusia yang masih kurang, serta masyarakat yang bersikap acuh tak acuh terhadap tujuan Desa Kabuna kembali ke status desa mandiri. Kemudian faktor pendukung yaitu program pengembangan sumber daya manusia, pemanfaatan sumber daya alam, dukungan lembaga-lembaga desa, dan partisipasi aktif masyarakat. **Kesimpulan:** Peneliti menyarankan pemerintah desa untuk lebih menyebarkan informasi tentang desa mandiri, menjalin kerjasama dengan stakeholder seperti pihak swasta ataupun perusahaan eksternal, serta bekerjasama dengan Lembaga Desa dalam memanfaatkan sumber daya alam lebih maksimal lagi untuk kepentingan desa.

**Kata Kunci:** Tata Kelola Pemerintahan, Pemerintah Desa, Desa Mandiri

## I. PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Pelaksanaan desentralisasi dengan otonomi daerah telah menjadi bagian penting dari reformasi pemerintahan di Indonesia yang dimulai pada tahun 1999. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, mengurangi ketidaksetaraan regional, dan mengoptimalkan pelayanan publik di tingkat lokal. Indonesia memiliki sistem pemerintahan daerah yang terdiri dari provinsi, kabupaten, dan kota. Setiap level pemerintahan daerah memiliki otonomi tertentu untuk mengatur urusan di wilayahnya masing-masing. Otonomi daerah adalah sebuah konsep dalam sistem pemerintahan yang memberikan kewenangan kepada daerah atau wilayah tertentu untuk mengatur dan mengelola urusan dalam lingkup wilayah mereka sendiri. Konsep ini bertujuan untuk memberikan ruang lebih besar bagi pemerintah daerah untuk mengembangkan potensi daerah masing-masing (Muin, 2014). Tata kelola yang dilakukan pemerintah daerah dalam mengambil keputusan dan mengatur urusan-urusan yang berkaitan dengan kepentingan lokal, sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan masyarakat di daerah tersebut.

Tata kelola pemerintahanan desa berarti proses pengambilan keputusan, eksekusi, dan administrasi desa yang membawa positif perubahan dalam kehidupan desa. Tata kelola desa telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 menjelaskan bahwa desa diberikan kewenangan pengakuan terhadap hak asal usul, penetapan kewenangan berskala lokal dan pengambilan keputusan secara lokal untuk kepentingan masyarakat desa, keberagaman, kebersamaan, kegotong-royongan, kekeluargaan, musyawarah, demokrasi, kemandirian, partisipasi, kesetaraan, pemberdayaan dan keberlanjutan (Mahardika et al. 2022).

Pemberian kewenangan untuk mengelola desa bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Pengelolaan desa dilakukan oleh Pemerintah Desa, Perangkat Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) serta masyarakat secara partisipatif mulai tahap perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi.

Sebagai pelaksana pemerintahan negara yang paling bawah yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, pemerintah desa memiliki peran strategis sebagai ujung tombak dalam mencapai tujuan negara sebagaimana diamanatkan konstitusi (Sumarno et al., 2022). Pemerintahan desa terdiri dari Pemerintah Desa yang meliputi Kepala Desa, Perangkat Desa, dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, kepala desa bertanggungjawab kepada Badan Permusyawaratan Desa dan memberikan laporan penyelenggaraan kegiatan kepada Bupati. Penyelenggaraan pemerintahan desa dimaksudkan untuk mempermudah mengimplementasikan kebijakan pusat di daerah sehingga pemerintahan bisa berjalan efektif karena ada yang mengelola dan mengarahkan masyarakat dengan tujuan berpartisipasi dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di tingkat daerah. Salah satu tujuan penyelenggaraan pemerintahan desa yaitu melaksanakan pembangunan secara berkelanjutan. Pembangunan ini mencakup infrastruktur, pelayanan kesehatan, pendidikan, pertanian, ekonomi, dan sektor-sektor lain yang dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa.

Pembangunan di desa sangatlah penting, sebab mayoritas warga negara Indonesia tinggal di wilayah pedesaan. Berdasarkan Buku Induk Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia Tahun 2022 oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) jumlah Desa di Indonesia sebanyak 74.093 dan wilayah Kelurahan sebanyak 8.412. Banyaknya jumlah desa di Indonesia berdampak pada tingkat kemiskinan masyarakat desa. Pemerintah pusat tidak dapat mengontrol setiap desa di Indonesia sehingga memerlukan pemerintah desa untuk mengelola dan mengurus desa sesuai dengan potensi desa untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa. Pemerintah pusat melihat pengelolaan desa oleh pemerintah desa melalui Indeks Desa Membangun. Indeks Desa Membangun (IDM) memberikan penilaian terhadap kemajuan setiap pembangunan desa serta memberi informasi terkait pembangunan desa.

Desa Kabuna memiliki banyak potensi untuk kembali menjadi desa mandiri. Salah satunya yaitu Desa Kabuna menjadi satu-satunya desa di Nusa Tenggara Timur yang terpilih menjadi perwakilan provinsi untuk mengikuti perlombaan desa cantik nasional pada tahun 2023 dan termasuk dalam 20 besar desa cantik di Indonesia setelah bersaing dengan 230 Desa di seluruh Indonesia. Dalam berita perlombaan desa cantik, Kepala Desa Kabuna memberikan ucapan terimakasih atas terpilihnya Desa Kabuna sebagai 20 besar desa cantik seluruh Indonesia. Kepala Desa Kabuna mengatakan bahwa Desa Kabuna berada pada posisi desa maju, tinggal selangkah menuju kepada desa mandiri. Tapi dalam mewujudkan Desa Kabuna menjadi desa mandiri ini punya banyak persoalan terutama persoalan kemasyarakatan dan juga persoalan - persoalan lain yang memang butuh sekali dukungan dari semua pihak. Program Desa Cinta Statistik (Desa Cantik) ini merupakan sebuah upaya quick win dari BPS Nasional untuk ikut serta dalam program penanggulangan kemiskinan di Indonesia. Dengan tata kelola pemerintahan desa yang baik, desa kabuna dapat menjadi desa mandiri kembali. Mewujudkan Desa Kabuna menjadi desa mandiri sesuai dengan visi Desa Kabuna yaitu

“Terwujudnya Desa Kabuna yang mandiri, mampu dalam pengelolaan potensi desa untuk mewujudkan masyarakat sejahtera, berbuaya dan religius, kreatif dan peduli terhadap lingkungan”.

Dari uraian masalah di atas peneliti tertarik untuk menganalisis permasalahan yang terjadi dengan melakukan penelitian dengan mengangkat permasalahan dengan judul **“TATA KELOLA PEMERINTAHAN DESA DALAM MEWUJUDKAN DESA MANDIRI DI DESA KABUNA KECAMATAN KAKULUK MESAK KABUPATEN BELU PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR”**.

## **1.2 Kesenjangan Masalah yang Diambil**

Meskipun desentralisasi dan otonomi daerah telah memberikan kewenangan yang lebih besar kepada pemerintah desa untuk mengelola dan mengembangkan potensi lokal, jumlah desa mandiri di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) masih sangat sedikit. Salah satu contoh nyata adalah Desa Kabuna, yang pada tahun 2018 sempat mencapai status Desa Mandiri namun kemudian mengalami penurunan status menjadi Desa Maju akibat penyalahgunaan kekuasaan oleh pemerintah desa yang menjabat saat itu. Peristiwa ini menunjukkan adanya kesenjangan antara potensi yang dimiliki desa dengan realitas implementasi tata kelola pemerintahan desa yang efektif dan berkelanjutan.

Penelitian ini mengidentifikasi beberapa faktor penghambat yang menyebabkan kesulitan Desa Kabuna dalam mempertahankan status Desa Mandiri, seperti keterbatasan sumber daya alam, dana desa, sumber daya manusia yang kurang memadai, serta sikap masyarakat yang acuh tak acuh terhadap tujuan desa. Kesenjangan ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat potensi besar untuk pengembangan, tanpa tata kelola yang baik dan partisipasi aktif dari semua pemangku kepentingan, upaya menuju desa mandiri akan menghadapi hambatan yang signifikan. Selain itu, dukungan dari program-program pemerintah dan lembaga desa perlu lebih dioptimalkan untuk mengatasi berbagai tantangan yang ada.

Kesenjangan lainnya terletak pada kurangnya informasi dan kerjasama yang efektif antara pemerintah desa dengan para pemangku kepentingan seperti sektor swasta dan perusahaan eksternal. Penelitian ini menyoroti pentingnya penyebaran informasi yang lebih luas tentang konsep desa mandiri serta perlunya kolaborasi strategis untuk memaksimalkan pemanfaatan sumber daya alam demi kesejahteraan masyarakat desa. Dengan mengidentifikasi dan menganalisis kesenjangan-kesenjangan ini, penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi praktis bagi Pemerintah Desa Kabuna dan desa-desa lain di NTT untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan desa dalam mewujudkan desa mandiri yang berkelanjutan.

## **1.3 Penelitian Terdahulu**

### **1. Pengembangan Desa Mandiri Melalui Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Agunggunanto, Arianti, Kushartono, Darwanto, 2016)**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa permasalahan yang dialami BUMDes adalah keterbatasan modal sehingga BUMDes tidak mampu menjalankan jenis usaha yang beragam serta kurangnya pengetahuan pengurus dalam manajemen BUMDes, sehingga kinerja kelembagaan BUMDes dalam

pengembangan usaha kurang optimal. Solusi untuk menghadapi permasalahan tersebut adalah pengurus BUMDes harus mengajukan bantuan modal kepada pihak ketiga, tidak hanya mengandalkan bantuan pemerintah saja.

## **2. Strategi Pengembangan Desa Mandiri Melalui Inovasi Bumdes (Irfan Nursetiawan, 2018)**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa desa mandiri merupakan desa yang mampu memenuhi kebutuhannya sendiri dan bantuan dari Pemerintah hanya bersifat stimulus. Pembangunan desa mandiri meliputi kegiatan-kegiatan rencana pembangunan yang bersifat partisipatif, transparan, akuntabel, dan mendetail. Adapun strategi yang dapat dilakukan untuk mencapai desa mandiri adalah dengan melakukan implementasi inovasi di setiap sendi lembaga usaha BUMDes dan optimalisasi aset serta potensi desa untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.

## **3. Pemerintahan Desa (Sugiman, 2018)**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peranan pemerintah desa dalam menggerakkan partisipasi masyarakat menuju kesejahteraan adalah bersifat persuasif untuk merencanakan, menciptakan, dan meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menggunakan sumber daya atau potensi baik sumber daya manusia (SDM) maupun sumber daya alam (SDA). Hal ini dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa melalui pengelolaan keuangan desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan desa untuk menciptakan ketertiban, kerukunan, keamanan, dan pemberdayaan masyarakat desa.

## **4. Tata Kelola Pemerintahan Desa dalam Mewujudkan Good Governance di Desa Kalibelo Kabupaten Kediri (Putra, 2017)**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan prinsip-prinsip good governance dalam tata kelola pemerintahan Desa Kalibelo harus ditingkatkan di beberapa aspek. Misalnya, aspek transparansi di mana Pemerintah Desa Kalibelo seharusnya memberi rincian jelas terhadap penggunaan dana desa serta membuat poster yang ditempelkan di tempat umum agar pemerintah lebih transparan. Aspek akuntabilitas juga perlu ditingkatkan di mana semua perangkat desa harus meningkatkan kinerjanya agar hasil yang dicapai dapat maksimal, sehingga menjadi pemerintahan yang good governance.

## **5. Tata Kelola Pemerintahan Desa Pada Perbedaan Indeks Desa Membangun (IDM): Studi Tiga Desa di Kabupaten Malang (Setyowati, 2019)**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari Indeks Desa Membangun Bidang Indeks Ketahanan Sosial Tahun 2017 terdapat 12 desa dengan kategori berkembang, 2 desa dengan kategori maju, dan 1 desa dengan kategori mandiri. Hal ini menunjukkan bahwa tidak adanya desa di Kecamatan Tumpang yang nilai indeks ketahanan sosialnya masuk dalam kategori tertinggal dan sangat tertinggal.

## **6. Praktik Pengelolaan dan Tata Kelola Pemerintahan Desa Dlingo di Kabupaten Bantul: Pembelajaran dari Desa Percontohan (Sofyani, Suryanto, Widiastuti, 2018)**

Penelitian yang dilakukan oleh Sofyani, Suryanto, dan Widiastuti (2018) di Desa Dlingo, Kabupaten Bantul, menginvestigasi dinamika permasalahan dalam pengelolaan dan tata kelola pemerintahan desa. Penelitian ini menggunakan pendekatan investigatif dengan melibatkan informan

dari aparaturnya desa, praktisi, dan akademisi. Metode yang digunakan meliputi wawancara, dokumentasi, dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa permasalahan utama yang dihadapi desa ini adalah dalam perumusan rencana strategis, pelaporan keuangan dan kinerja, serta pencapaian kinerja desa. Untuk mengatasi masalah ini, Pemdes Dlingo melakukan sinergi dengan Pemkab, Pemprov, universitas, dan pendekatan persuasif untuk mengubah pola pikir masyarakat agar lebih mandiri.

#### **7. PROGRAM "SI PEMADAM TOLAK API" (PELATIHAN DAN PENDAMPINGAN TATA KELOLA, AKUNTABILITAS DAN EVALUASI) PENYUSUNAN RKP DESA GENTONG KABUPATEN NGAWI (Haryanto, Ditasari, Novitasari, 2023)**

Haryanto, Ditasari, dan Novitasari (2023) dalam penelitian mereka di Desa Gentong, Kabupaten Ngawi, mengembangkan program "Si Pemadam Tolak Api" yang bertujuan untuk meningkatkan tata kelola dan akuntabilitas dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa). Program ini melibatkan pelatihan dan pendampingan yang menekankan literasi terkait tata kelola lokal dan penggunaan teknologi informasi. Fokus utama adalah mendorong partisipasi dan kesadaran masyarakat dalam pembangunan desa. Hasil program ini menunjukkan peningkatan pemahaman dan komitmen pemerintah desa dalam menjalankan pemerintahan yang efektif dan berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan.

#### **8. STRATEGI MEMPERCEPAT PEMBANGUNAN DESA MANDIRI: STUDI DI DESA KEMADANG GUNUNGKIDUL (Nur Arifah, Kusumastuti, 2019)**

Penelitian oleh Nur Arifah dan Kusumastuti (2019) di Desa Kemadang, Gunungkidul, mengeksplorasi strategi percepatan pembangunan desa hingga mencapai status desa mandiri. Mereka menemukan bahwa pemerintah Desa Kemadang melakukan pemetaan potensi, pembinaan, dan pendampingan, serta membangun jaringan sinergis untuk mencapai tata kelola yang modern. Transformasi pembangunan yang terjadi mencakup peningkatan layanan kesehatan dan fasilitas umum, serta keberagaman produksi masyarakat dan program mitigasi bencana. Penelitian ini menunjukkan pentingnya strategi yang terstruktur dan sinergis dalam mencapai desa mandiri.

#### **9. Analisis Tata Kelola Kolaboratif Desa Wisata yang Mandiri dan Berkelanjutan: Investigasi Empiris dari Ngargoretno-Magelang (Wibowo, Suherlan, Nurrochman, 2022)**

Wibowo, Suherlan, dan Nurrochman (2022) meneliti tata kelola kolaboratif dalam pengembangan desa wisata yang mandiri dan berkelanjutan di Desa Wisata Ngargoretno, Magelang. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk memahami pandangan dan pengalaman para pemangku kepentingan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa visi dan misi yang jelas serta kolaborasi antara berbagai pihak sangat penting untuk mengatasi tantangan dalam pengembangan desa wisata. Meskipun terdapat kendala dalam inovasi dan aksesibilitas, semangat kolaborasi telah mendorong kesejahteraan masyarakat setempat.

#### **10. Peningkatan Tata Kelola BUM Desa Jaya Mandiri Bangkalan melalui Pendampingan Tata Kelola Intensif (Fauzan, Purbasari, 2020)**

Fauzan dan Purbasari (2020) memfokuskan penelitian mereka pada peningkatan tata kelola Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) Jaya Mandiri di Bangkalan melalui pendampingan intensif. Mereka menemukan bahwa pelatihan dan pendampingan dari perguruan tinggi dapat memperbaiki tata kelola administratif BUM Desa. Selain itu, komitmen pemerintah desa, tanggung jawab dan

keaktivitas pengelola, serta partisipasi masyarakat sebagai pengguna BUM Desa merupakan faktor penting dalam mempertahankan tata kelola yang baik. Pendampingan intensif ini bertujuan untuk memastikan bahwa pengelola memahami tugas dan fungsi mereka dalam mengelola BUM Desa secara efektif.

#### **1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah**

Penelitian ini memberikan kontribusi baru dalam konteks tata kelola pemerintahan desa dengan fokus pada Desa Kabuna di Kecamatan Kakuluk Mesak, Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kebaruan ilmiah dari penelitian ini terletak pada analisis mendalam tentang bagaimana prinsip-prinsip tata kelola yang baik diterapkan untuk mewujudkan desa mandiri di wilayah tersebut. Meskipun banyak penelitian sebelumnya telah membahas tata kelola desa dan pengembangan BUMDes, penelitian ini menyoroti aspek-aspek spesifik dan unik dari Desa Kabuna, termasuk partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa dan tantangan yang dihadapi dalam proses tersebut.

Selain itu, penelitian ini juga mengeksplorasi penerapan program Desa Cinta Statistik (Desa Cantik) sebagai salah satu strategi untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian desa. Program ini merupakan inovasi yang relatif baru dan belum banyak dibahas dalam literatur sebelumnya. Dengan fokus pada Desa Kabuna, penelitian ini dapat memberikan wawasan yang berharga mengenai bagaimana program ini dapat diimplementasikan secara efektif untuk mengatasi berbagai permasalahan desa dan memaksimalkan potensi lokal. Hal ini menjadikan penelitian ini sebagai salah satu studi yang pionir dalam mengkaji dampak program Desa Cantik di konteks spesifik.

Lebih jauh, penelitian ini menawarkan perspektif baru tentang peran kolaboratif antara pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan masyarakat dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Dengan menganalisis praktik-praktik terbaik dan strategi inovatif yang diterapkan di Desa Kabuna, penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi desa-desa lain yang ingin meningkatkan tata kelola pemerintahan desa dan mencapai kemandirian. Pendekatan partisipatif yang diuraikan dalam penelitian ini juga dapat memberikan model yang efektif untuk penerapan kebijakan desa lainnya di Indonesia.

#### **1.5 Tujuan**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis tata kelola pemerintahan Desa dalam mewujudkan desa mandiri di Desa Kabuna, Kecamatan Kakuluk Mesak, Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Secara khusus, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan mendeskripsikan faktor-faktor yang menghambat upaya pelaksanaan tata kelola pemerintahan Desa dalam mencapai kemandirian serta faktor-faktor yang mendukung upaya tersebut. Melalui analisis mendalam dan deskriptif, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang komprehensif mengenai praktik-praktik tata kelola pemerintahan yang efektif dan inovatif dalam konteks desa, serta memberikan rekomendasi untuk peningkatan kinerja pemerintah desa dalam mewujudkan desa mandiri.

## II. METODE

Pada penelitian ini peneliti menggunakan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah metode penelitian berfokus pada pengamatan yang dilakukan secara mendalam, yang menghasilkan kajian atas sebuah fenomena yang lebih komprehensif. Penelitian kualitatif menggambarkan kondisi nyata saat melaksanakan penelitian, pengumpulan data kemudian diinterpretasikan ke dalam analisis dan perumusan terhadap masalah yang dihadapi di lapangan. Penelitian kualitatif ini bisa berkembang saat di lapangan menyesuaikan dengan permasalahan yang sifatnya sementara atau tentatife. Berdasarkan pola yang ditempuh serta aspek yang diteliti, penelitian ini termasuk penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pendekatan deskriptif kualitatif yaitu pendekatan penelitian dimana data-data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar-gambar dan bukan angka. Data-data tersebut dapat diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, foto, video tape, dokumentasi pribadi, catatan, atau memo dan dokumentasi lainnya (Moleong, 2005). Penelitian deskriptif itu sendiri ialah melakukan pencarian fakta dan melakukan survey dari beberapa jenis pertanyaan. Metode kualitatif deskriptif menghasilkan dan juga mengolah data yang bersifat deskriptif seperti observasi dan juga wawancara.

Pada penelitian ini akan menggambarkan dan memahami adanya peristiwa di dalam masyarakat yang dianggap termasuk ke dalam penyimpangan sosial dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Pendekatan yang bercirikan deskriptif kualitatif ini bertujuan mengkaji dan mengklarifikasi mengenai adanya suatu fenomena yang terjadi di dalam masyarakat (Effendy, 2023). Suatu fenomena atau kenyataan di masyarakat yang mengungkapkan jika dengan adanya metode deskriptif kualitatif bisa dijadikan prosedur untuk memecahkan masalah yang sedang diteliti. Masalah yang sedang diselidiki adalah berdasarkan fakta-fakta yang ada dan tampak di dalam masyarakat.

Teknik penentuan informan yang dilakukan oleh peneliti dalam melakukan penelitian mengenai tata kelola pemerintahan desa dalam mewujudkan Desa Mandiri di Desa Kabuna adalah teknik *purposive sampling*. *Purposive sampling* merupakan teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu, misalnya orang yang dianggap sangat mengetahui mengenai apa yang kita ingin ketahui, atau seorang penguasa sehingga peneliti mudah dalam menjelajahi objek/situasi sosial yang diteliti.

Peneliti melakukan analisis data sesuai dengan tahapan yang diawali dengan mengumpulkan data, reduksi data, display data dan menarik kesimpulan atau verifikasi yang digunakan untuk menganalisis masalah untuk mendapatkan hasil dalam pelaksanaan penelitian riset terapan pemerintahan mengenai tata kelola pemerintahan desa di Desa Kabuna.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 3.1 Tata Kelola Pemerintah Desa dalam Mewujudkan Desa Mandiri di Desa Kabuna

Desa mandiri adalah konsep pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan kemandirian ekonomi, sosial, dan lingkungan suatu desa. Desa mandiri merupakan desa yang mampu memenuhi

kebutuhan dasar penduduknya secara mandiri, tanpa tergantung sepenuhnya pada bantuan eksternal atau dukungan dari pemerintah. Dengan menjadi desa mandiri, sebuah desa dapat mencapai kesejahteraan yang berkelanjutan bagi penduduknya, memperkuat ketahanan ekonomi dan lingkungan, serta berperan aktif dalam pembangunan nasional secara keseluruhan.

Provinsi Nusa Tenggara Timur sendiri sampai pada tahun 2023 masih belum memiliki 1 desa mandiri. Desa Kabuna pada tahun 2019 merupakan satu-satunya desa mandiri di NTT, namun pada tahun 2020 Desa Kabuna turun menjadi desa berkembang. Desa Kabuna memiliki banyak potensi yang belum dioptimalkan oleh pemerintah dan masyarakat desa untuk kembali menjadi desa mandiri. Mewujudkan desa mandiri tidak hanya untuk mencapai suatu tujuan, namun memperoleh berbagai manfaat diantaranya:

1. Desa mandiri memiliki kemampuan untuk mengelola administrasi dan keuangan desa secara mandiri dan bertanggung jawab, yang merupakan landasan penting bagi pembangunan berkelanjutan dan penguatan otonomi daerah.
2. Desa mandiri mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan dan pengelolaan sumber daya, sehingga meningkatkan rasa memiliki, tanggung jawab, dan kapasitas masyarakat dalam mengatasi berbagai tantangan pembangunan.
3. Desa mandiri dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan rumah tangga, dan memberdayakan kelompok-kelompok rentan seperti petani, nelayan, dan perempuan.

Desa mandiri membantu menciptakan keseimbangan pembangunan antara wilayah perkotaan dan pedesaan dengan meningkatkan aksesibilitas, pemerataan akses terhadap layanan dasar, dan meningkatkan kapasitas desa untuk berkontribusi pada pembangunan nasional.

Berdasarkan pengalaman dan pengumpulan data dan informasi di lapangan, peneliti mendeskripsikan 5 indikator tersebut sebagai berikut:

1. Partisipasi

Pencapaian status desa mandiri membutuhkan kerja keras, keterlibatan aktif masyarakat, dukungan pemerintah, serta kerjasama antara berbagai pihak terkait. Partisipasi dari segala pihak merupakan faktor penting agar tujuan bersama yang disepakati dapat dicapai sesuai dengan rencana.

2. Transparansi

Penyelenggaraan pemerintahan yang transparan merupakan salah satu bentuk penyelenggaraan Good Governance yang mempengaruhi dalam tujuan desa untuk mewujudkan Desa Mandiri. Transparansi adalah kunci untuk membangun kepercayaan, akuntabilitas, serta dapat meningkatkan partisipasi dari masyarakat.

Untuk mewujudkan Desa Kabuna menjadi desa mandiri, pemerintah desa harus menyelenggarakan pemerintahan secara transparan guna mendapatkan kepercayaan masyarakat serta dengan memiliki informasi yang lengkap dan akurat, masyarakat dapat mengambil keputusan yang lebih baik, memperjuangkan hak-hak mereka, dan berpartisipasi secara aktif dalam proses pembangunan desa. Dengan adanya transparansi, masyarakat

dapat memastikan bahwa informasi mengenai kebijakan, anggaran, dan keputusan pembangunan tersedia secara terbuka, masyarakat akan merasa lebih percaya dan memiliki legitimasi terhadap tindakan pemerintah desa.

### 3. Akuntabilitas

Akuntabilitas mengacu pada kewajiban para pemimpin dan institusi pemerintahan untuk bertanggungjawab atas keputusan dan tindakan mereka kepada masyarakat serta pihak-pihak yang terkena dampak. Dalam pemerintahan desa, keputusan dan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah desa harus dapat dipertanggungjawabkan karena berpengaruh dalam kehidupan masyarakat. Akuntabilitas pemerintah desa dapat meningkatkan tingkat kepercayaan masyarakat serta mencegah tindakan menyimpang dari pemerintah desa.

### 4. Efektivitas

Efektivitas dalam hal ini merujuk pada kemampuan pemerintah desa dalam mencapai tujuan yang diinginkan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada secara efisien. Efektivitas tentang mencapai tujuan dengan cara yang paling baik, serta memperhatikan kebutuhan dan aspirasi dari semua pihak. Suatu tindakan atau program dianggap efektif jika responsif terhadap kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

Untuk mencapai tujuan desa yaitu mewujudkan desa Kabuna menjadi desa mandiri, maka diperlukan keputusan dan kebijakan yang efektif dari pemerintah desa serta dukungan dari semua pihak yang terlibat dengan desa. Pengambilan keputusan dan penetapan kebijakan harus menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat desa agar keputusan dan kebijakan tersebut tepat sasaran dan menjawab permasalahan masyarakat.

### 5. Penegakkan Hukum

Penegakkan hukum berperan dalam mewujudkan desa mandiri dengan memastikan bahwa aturan dan peraturan ditegakkan dengan adil dan konsisten. Penegakkan hukum membantu dalam mencegah dan menindak pelanggaran hukum yang dapat menghambat pembangunan desa. Ini mencakup pencegahan dan penindakan terhadap tindakan korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, pencurian sumber daya alam, dan pelanggaran lainnya yang dapat merugikan masyarakat desa.

## 3.2 Faktor Penghambat Tata Kelola Pemerintahan Desa dalam Mewujudkan Desa Mandiri di Desa Kabuna

Selama melaksanakan penelitian dilapangan melalui wawancara dengan narasumber tentang tata kelola pemerintahan desa di Desa Kabuna, peneliti menemukan berbagai faktor penghambat tata kelola pemerintahan desa dalam mewujudkan desa mandiri di Desa Kabuna. Faktor penghambat ialah segala hal yang menjadi kendala dari terlaksana suatu kebijakan.

### 1. Dana Desa

Pengurangan dana desa oleh pemerintah daerah berdampak pada pembangunan dan program desa yang ditunda sehingga kurang optimal desa dalam memanfaatkan dana yang ada. Dalam mewujudkan desa mandiri di Desa Kabuna dibutuhkan dana yang memadai untuk

lebih mengotimalkan sumber daya maupun meningkatkan sarana dan prasarana dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

## **2. Sumber Daya Manusia**

Sumber daya manusia merupakan faktor penting dalam menjalankan penyelenggaraan pemerintahan. Keterampilan dan pengetahuan dari masyarakat desa dapat dimanfaatkan dalam upaya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan jujur serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa. Dengan memanfaatkan potensi sumber daya manusia secara maksimal, desa dapat meningkatkan kapasitasnya untuk mandiri secara ekonomi, sosial, dan lingkungan.

## **3. Perhatian Masyarakat**

Mewujudkan desa mandiri di Desa Kabuna dibutuhkan partisipasi aktif dari setiap unsur di desa terutama masyarakat desa. Pemahaman masyarakat desa tentang apa itu desa mandiri serta manfaat desa mandiri sendiri perlu disosialisasikan untuk mendapatkan perhatian masyarakat. Dengan perhatian masyarakat yang tinggi maka akan meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan di Desa Kabuna.

### **3.3 Faktor Pendukung Tata Kelola Pemerintahan Desa dalam Mewujudkan Desa Mandiri di Desa Kabuna**

Selama penelitian yang dilakukan oleh peneliti di Desa Kabuna, peneliti tidak hanya menemukan faktor penghambat melainkan juga terdapat faktor pendukung yang mempengaruhi tata kelola pemerintahan desa dalam mewujudkan desa mandiri di Desa Kabuna. Faktor pendukung mengacu pada faktor yang mendukung keberhasilan dan terlaksana tata kelola pemerintahan desa dalam mewujudkan desa mandiri di Desa Kabuna.

#### **1. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia**

Pengembangan sumber daya manusia berpengaruh dalam mewujudkan desa mandiri. Program yang dilakukan oleh pemerintah desa Kabuna dalam hal pengembangan sumber daya manusia ditujukan untuk meningkatkan sumber daya manusia yang ada sehingga dapat dioptimalkan dalam membantu penyelenggaraan pemerintahan nantinya. Peningkatan sumber daya manusia juga dapat berdampak pada pengoptimalan sumber daya alam yang ada oleh masyarakat desa beserta pemerintah desa. Sumber daya alam yang ada di Desa Kabuna dapat menjadi pendukung pemerintah desa dengan memanfaatkannya salah satunya sebagai tempat wisata yang dapat menambah pendapatan desa.

#### **2. Partisipasi Lembaga Desa Serta Masyarakat Desa**

Dukungan dan partisipasi masyarakat serta lembaga-lembaga desa dibutuhkan dalam mewujudkan desa mandiri. Masyarakat dapat ikut serta berpartisipasi aktif dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dengan memberikan suara dan keluhan untuk pemerintahan desa lebih baik lagi. Lembaga-lembaga desa yang ada dapat mendukung pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sesuai dengan tupoksi masing-masing lembaga dengan maksimal sehingga tujuan desa yang ditetapkan bersama dapat tercapai.

### **3.4 Diskusi Temuan Utama Penelitian**

Penelitian ini mengungkapkan bahwa tata kelola pemerintahan Desa Kabuna dalam upaya mewujudkan desa mandiri melibatkan beberapa indikator kunci seperti partisipasi, transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan penegakkan hukum. Hal ini sejalan dengan temuan Agunggunanto et al. (2016), yang menekankan pentingnya pengelolaan yang baik dan partisipatif dalam pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Namun, penelitian ini menambahkan bahwa transparansi dan akuntabilitas sangat krusial dalam mendapatkan kepercayaan dan partisipasi aktif dari masyarakat, yang tidak terlalu ditekankan dalam penelitian Agunggunanto.

Selain itu, penelitian Nursetiawan (2018) menggarisbawahi strategi pengembangan desa mandiri melalui inovasi di BUMDes dan optimalisasi aset desa. Penelitian ini mengonfirmasi bahwa inovasi dan optimalisasi sumber daya juga penting di Desa Kabuna. Namun, penelitian ini memperluas fokus dengan menekankan peran transparansi dan akuntabilitas dalam memastikan bahwa inovasi dapat diimplementasikan secara efektif dan berkelanjutan, memperkuat aspek pemerintahan yang baik.

Sugiman (2018) menyoroti peran pemerintah desa dalam menggerakkan partisipasi masyarakat menuju kesejahteraan melalui pengelolaan sumber daya. Temuan ini selaras dengan hasil penelitian kami yang menunjukkan bahwa partisipasi aktif masyarakat merupakan faktor penting dalam mencapai kemandirian desa. Namun, penelitian ini menambahkan bahwa selain partisipasi, efektivitas kebijakan dan program yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat juga esensial untuk mencapai tujuan desa mandiri.

Temuan ini juga memperlihatkan adanya faktor penghambat seperti keterbatasan dana desa dan kurangnya perhatian masyarakat yang menghambat upaya pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang efektif. Ini berbeda dengan penelitian terdahulu yang lebih fokus pada permasalahan internal seperti modal BUMDes dan manajemen kelembagaan. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi baru dengan mengidentifikasi tantangan eksternal yang dapat menghambat kemandirian desa, serta solusi yang dapat diambil untuk mengatasi hambatan tersebut, seperti peningkatan sumber daya manusia dan partisipasi aktif masyarakat.

### **3.5 Diskusi Temuan Menarik**

Penulis menemukan bahwa salah satu faktor penghambat utama dalam mewujudkan desa mandiri di Desa Kabuna adalah keterbatasan dana desa. Pengurangan dana desa oleh pemerintah daerah menyebabkan penundaan dalam pembangunan dan pelaksanaan program-program desa, sehingga potensi yang ada tidak dapat dioptimalkan. Hal ini mengakibatkan desa menjadi kurang mandiri karena tidak memiliki sumber daya finansial yang cukup untuk mendukung berbagai inisiatif yang diperlukan untuk mencapai kemandirian. Penemuan ini menarik karena menunjukkan bahwa dukungan finansial yang stabil dan memadai dari pemerintah daerah merupakan elemen kunci dalam mendukung tata kelola pemerintahan desa yang efektif dan berkelanjutan. Tanpa dana yang cukup, upaya untuk meningkatkan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan ekonomi desa menjadi terhambat, yang pada gilirannya menghambat pencapaian status desa mandiri.

Selain keterbatasan dana, perhatian dan partisipasi masyarakat juga ditemukan sebagai faktor penghambat signifikan. Rendahnya pemahaman masyarakat tentang konsep desa mandiri dan manfaat yang dapat diperoleh mengakibatkan kurangnya partisipasi aktif dalam berbagai program pembangunan desa. Hal ini diperparah dengan kurangnya sosialisasi dari pihak pemerintah desa mengenai pentingnya keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan. Penemuan ini menunjukkan bahwa untuk mencapai kemandirian desa, selain dukungan finansial, diperlukan juga upaya yang kuat dalam meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat. Pemerintah desa perlu mengambil langkah proaktif dalam mensosialisasikan konsep dan manfaat desa mandiri, serta melibatkan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan program-program pembangunan. Dengan demikian, masyarakat akan merasa lebih memiliki dan bertanggung jawab terhadap kemajuan desa mereka, yang pada akhirnya akan mendukung tercapainya desa mandiri secara lebih efektif.

#### IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis penelitian yang dilakukan melalui wawancara dan dokumentasi terkait tata kelola pemerintahan desa dalam mewujudkan desa mandiri di Desa Kabuna, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan tata kelola pemerintahan desa telah berjalan dengan optimal. Dimensi-dimensi partisipasi, transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan penegakan hukum menjadi indikator penting dalam menemukan masalah serta keunggulan tata kelola pemerintahan di desa ini. Pemerintah desa telah berhasil memastikan partisipasi aktif dari semua pihak yang terlibat, menyediakan keterbukaan informasi, bertanggung jawab dalam pelaksanaan kebijakan, serta menetapkan kebijakan yang efektif dalam mencapai tujuan pembangunan desa mandiri.

Faktor-faktor yang menghambat tata kelola pemerintahan desa dalam mewujudkan desa mandiri di Desa Kabuna antara lain pengurangan dana desa oleh pemerintah daerah, kekurangan sumber daya manusia yang memadai, serta kurangnya perhatian dan partisipasi masyarakat. Pengurangan dana desa berdampak pada penundaan program pembangunan, sementara kekurangan sumber daya manusia menantang pemerintah desa dalam memanfaatkan teknologi dan potensi desa secara optimal. Sikap acuh tak acuh sebagian masyarakat terhadap program desa mandiri juga menjadi hambatan dalam mencapai tujuan yang diinginkan.

Di sisi lain, terdapat beberapa faktor pendukung yang membantu dalam mewujudkan desa mandiri di Desa Kabuna. Program pengembangan sumber daya manusia yang dilakukan oleh pemerintah desa bertujuan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat dalam menyelenggarakan pemerintahan dan memanfaatkan sumber daya alam desa. Partisipasi aktif lembaga desa serta masyarakat desa juga berperan penting dalam memberikan pelayanan yang lebih baik dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Dengan sinergi antara pemerintah desa, lembaga desa, dan masyarakat, Desa Kabuna mampu mencapai kemajuan yang signifikan dalam mewujudkan desa mandiri.

**Keterbatasan Penelitian.** Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan. Pertama, data yang dikumpulkan hanya berasal dari wawancara dan dokumentasi, yang mungkin tidak sepenuhnya mencerminkan kondisi keseluruhan di lapangan. Kedua, keterbatasan waktu penelitian dapat mempengaruhi kedalaman analisis yang dilakukan. Ketiga, partisipasi responden dalam

wawancara mungkin dipengaruhi oleh bias subjektif, yang bisa mempengaruhi keakuratan informasi yang diberikan. Selain itu, faktor-faktor eksternal seperti perubahan kebijakan pemerintah yang terjadi selama periode penelitian juga dapat mempengaruhi hasil dan kesimpulan yang diambil.

**Arah Masa Depan Penelitian (Future Work).** Untuk penelitian di masa depan, disarankan untuk memperluas cakupan studi dengan melibatkan lebih banyak desa sebagai objek penelitian guna mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif tentang tata kelola pemerintahan desa dalam mewujudkan desa mandiri. Selain itu, penggunaan metode penelitian yang lebih beragam seperti survei kuantitatif dan analisis statistik dapat memberikan data yang lebih objektif dan mendalam. Penelitian lanjutan juga dapat meneliti pengaruh intervensi spesifik, seperti pelatihan peningkatan kapasitas sumber daya manusia atau implementasi teknologi informasi, terhadap efektivitas tata kelola pemerintahan desa. Kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk akademisi, pemerintah, dan masyarakat, juga penting untuk mengembangkan strategi yang lebih efektif dan berkelanjutan dalam mencapai tujuan desa mandiri.

## V. UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk terlibat dalam penelitian ini. Saya ingin menyampaikan penghargaan yang tulus kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan, dan wawasan selama proses penelitian. Tanpa kerjasama dan kontribusi dari berbagai pihak, penelitian ini tidak akan terwujud dengan baik. Semoga hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi positif bagi pengembangan kebijakan dan penataan tenaga kerja di masa mendatang. Terima kasih atas waktu, dukungan, dan kerja sama yang telah diberikan. Semoga kita dapat terus berkolaborasi untuk mencapai tujuan yang lebih baik.

## VI. DAFTAR PUSTAKA

- Agunggunanto, Fitri Arianti, Edi Wibowo Kushartono, and Darwanto, 'Pengembangan Desa Mandiri Melalui Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa', (2016)
- Eko Setyowati, 'Tata Kelola Pemerintahan Desa Pada Perbedaan Indeks Desa Membangun (IDM) : Studi Tiga Desa Di Kabupaten Malang', (2019)
- Fatkul Muin, 'Otonomi Daerah Dalam Persepektif Pembagian Urusan Pemerintah-Pemerintah', *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, 8.1 (2014), 69–79
- Irfan Nursetiawan, 'Strategi Pengembangan Desa Mandiri Melalui Inovasi Bumdes', (2018)
- Sugiman, 'Pemerintah Desa', *Pemerintahan Desa, Fakultas Hukum Universitas Suryadarma*, 7.1 (2018), 82–95 <<https://media.neliti.com/media/publications/275406-pemerintahan-desa-bc9190f0.pdf>>
- Sofyani, H., Suryanto, R., & Widiastuti, H. (2018). *Praktik Pengelolaan dan Tata Kelola Pemerintahan Desa Dlingo di Kabupaten Bantul: Pembelajaran dari Desa Percontohan*. *Jati: Jurnal Akuntansi Terapan Indonesia*.
- Haryanto, S. D., Ditasari, R. A., & Novitasari, D. A. (2023). PROGRAM "SI PEMADAM TOLAK API" (PELATIHAN DAN PENDAMPINGAN TATA KELOLA, AKUNTABILITAS DAN EVALUASI) PENYUSUNAN RKP DESA GENTONG KABUPATEN NGAWI. *Jurnal Abdi Insani*.
- Moleong, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005)

- Nur Arifah, M., & Kusumastuti, N. (2019). Strategi Mempercepat Pembangunan Desa Mandiri: Studi di Desa Kemadang Gunungkidul. *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat: Media Pemikiran dan Dakwah Pembangunan*.
- Wibowo, B., Suherlan, H., & Nurrochman, M. (2022). Analisis Tata Kelola Kolaboratif Desa Wisata yang Mandiri dan Berkelanjutan: Investigasi Empiris dari Ngargoretno-Magelang. *Jurnal Kepariwisata: Destinasi, Hospitalitas dan Perjalanan*.
- Fauzan, E. M., & Purbasari, I. (2020). Peningkatan Tata Kelola BUM Desa Jaya Mandiri Bangkalan melalui Pendampingan Tata Kelola Intensif. *Jurnal Ilmiah Pangabdhi*.
- I Gede Adi Putra, & Deli Bunga Saravistha, 'Pengaturan Wewenang, Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa di Desa Marga Dauh Puri'. *PARTA : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*. (2022)
- Sumarno Sumarno, Kosariza Kosariza, & Arfa'i Arfa'i. "Analisis Kedudukan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Desa Berdasarkan Perkembangan Pengaturan Desa", *Limbago: Journal of Constitutional Law*, (2022)
- Vivaldi Vito Mahardika and Ummul Sunny Firdaus, 'Analysis of Law Number of 2014 Concerning Villages', *Jurnal Demokrasi Dan Ketahanan Nasional* |, 1.1 (2022), 205–11.
- Erwan Effendy, Muhammad Rivaldi Harahap, & Nurul Aulia, "Kriminalitas Pada Remaja Dalam Perspektif Pandangan Islam", (2023)

